

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2012, *Sertifikat Hak atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2016, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertifikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Arba, 2019, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, 1984, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, CV. Remaja Karya, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Eddy Ruchiyat, 2006, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Baru*, P.T Alumni, Bandung.
- Effendy Perangin, 2005, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ferdy Ananda, 2016, *Akibat Hukum Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Bersifat Ganda (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Herman Hermit, 2009, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- I Made Widnyana, 2009, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.

- Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Tekni Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- J. Andi Hartanto, 2014, *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Mardalis, 2017, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Maria SW dalam Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nurmaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Oetje Salman dan Anthon F, 2005, *Teori Hukum (mengingat, menguumpul dan membukakembali)*, Rafika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarjita, 2012, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S. Chandra, 2005, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah: Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2015, *Perolehan Hak atas tanah*, Kencana, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan*.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan*.

Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang *Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara*.

Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang *Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*.

C. Internet dan Jurnal

<http://Raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum>, diakses padatanggal 9 September 2023, Pukul 10.20 WIB.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html> di akses pada 20 November 2023, pukul 14.44 WIB.

Rizaldi, M., Mujiburohman, Dkk. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha dan Hak Milik”, *Jurnal Widya Bhumi*, Vol 3 No 2, Oktober (2023)

Teressyavira Luvianti, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah yang Tumpang Tindih (Overlapping) Kepemilikan (Studi Putusan Mahkamah

Agung Nomor 221 PK/PDT/2014)”, *Unes Law Review*, Vol 6 No 2, Desember (2023)

Maya Sartika, Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah, *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, Volume 2 Nomor 1, Juni (2019)

Sri Hajati, Dkk, “Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Yang Efisiensi dan Berkepastian Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1, Januari (2014)

Baiq Rika Septina Wardani, Dkk, “Akibat Hukum Atas Terbitnya Sertifikat Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat)”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol.4 No.1, Januari (2023)

Budi Astuti, “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online”, *Al-Qisth Law Review*, Vol.6 No.2 (2023).

